

Konsultasi pajak SolveTax
StB Dipl.-Bw (FH) Sascha Schneider

Schwindstraße 2
63739 Aschaffenburg

Telepon: +49 151 28960404

E-mail: mail@solvetax.de
www.solvetax.de

Selamat siang,

Pengadilan Fiskal Federal Jerman mengomentari apakah pembayaran pesangon yang dilakukan sebagai kompensasi atas hilangnya pendapatan dari pekerjaan dapat secara efektif ditransfer ke rekening waktu kerja (Wertguthaben) atau ditransfer ke Dana Pensiun Jerman (Deutsche Rentenversicherung Bund) dengan basis bebas pajak untuk menghindari arus masuk ke karyawan.

Dalam keputusan lain, Pengadilan Fiskal Federal mengomentari persyaratan untuk "kebutuhan wajib pajak untuk mengetahui" tentang "penipuan PPN" oleh pihak ketiga mengenai keabsahan pengurangan pajak masukan.

Pada tanggal 11.10.2023, Kabinet Federal mengadopsi Ordonansi tentang Parameter Perhitungan Jaminan Sosial 2024.

Undang-Undang Efisiensi Energi yang disahkan oleh Bundestag Jerman pada tanggal 21 September 2023 menetapkan target efisiensi energi yang jelas. Undang-undang ini juga mencakup langkah-langkah konkret untuk sektor publik dan perusahaan serta menetapkan standar efisiensi untuk pusat data untuk pertama kalinya.

Jika entri belum dibuat dalam daftar transparansi, entri tersebut harus dibuat sebagai hal yang mendesak, jika tidak, denda dapat dikenakan. Kementerian Keuangan Federal kembali menekankan hal ini dalam sebuah surat kepada asosiasi.

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang artikel dalam edisi Informasi Bulanan kali ini atau tentang topik lainnya? Silakan hubungi kami. Kami akan dengan senang hati memberi tahu Anda.

Untuk pembayar pajak penghasilan

Pertimbangan tarif tetap harga energi dalam jumlah 300 Euro dalam pengembalian pajak

Jika pensiunan telah menerima "tunjangan sekaligus harga energi untuk pensiunan" pada bulan Desember 2022 melalui layanan pensiun Deutsche Post AG (asuransi pensiun wajib) atau asuransi pensiun Knappschaft-Bahn-See Jerman atau dana pensiun pertanian, jumlah yang dibayarkan tidak perlu dilaporkan dalam SPT tahun 2022 sebagai pengecualian. Hal ini dikarenakan kantor pajak menerima pemberitahuan elektronik atas pembayaran tersebut dan secara otomatis akan memperhitungkan tunjangan energi dengan tarif tetap ini untuk tahun 2022.

Jika wajib pajak memperoleh penghasilan dari pertanian dan kehutanan, operasi bisnis, wiraswasta, atau dari pekerjaan aktif sebagai karyawan pada tahun 2022, mereka berhak atas "harga energi sekaligus untuk orang yang dipekerjakan" sebesar 300 euro. Tidak ada entri yang perlu dibuat dalam pengembalian pajak penghasilan. Jika wajib pajak telah menerima penghasilan dari hubungan kerja aktif, tunjangan energi tarif tetap biasanya telah dibayarkan melalui pemberi kerja. Jika wajib pajak belum menerima tunjangan harga energi dan termasuk dalam salah satu kelompok orang, pembayaran akan dilakukan kemudian melalui ketetapan pajak penghasilan dari kantor pajak yang bertanggung jawab. Kantor pajak secara otomatis memperhitungkan tunjangan harga energi tetap.

Catatan

Pencantuman tarif tetap harga energi dalam SPT hanya dapat dilakukan jika wajib pajak melakukan hubungan kerja jangka pendek atau marjinal (pekerjaan mini) atau kegiatan sementara di bidang pertanian dan kehutanan pada tahun 2022. Dalam hal ini, "Lampiran Lainnya" juga harus diserahkan.

Di sisi lain, jika wajib pajak hanya memiliki penghasilan dari hubungan kerja marjinal (pekerjaan kecil) pada tahun 2022 dan telah menerima pajak energi tarif tetap dari pemberi kerja mereka, maka tidak ada pengembalian pajak penghasilan yang diperlukan dalam hal ini.

Pemeriksaan yang seragam atas niat untuk menghasilkan laba untuk semua saham bisnis yang dijual

Perselisihan ini menyangkut penilaian kerugian pajak yang dihasilkan dengan menciptakan saham baru di

sebuah perusahaan melalui resolusi peningkatan modal dengan premi tinggi dan kemudian dijual kembali kepada pasangannya.

Pengadilan Fiskal Federal memutuskan bahwa kerugian atas pelepasan yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan pajak tidak, pada umumnya, mempertanyakan niat untuk menghasilkan laba, tetapi harus dinilai apakah peluang penataan hukum (Bagian 42 AO) telah disalahgunakan. Jika saham dalam suatu perusahaan diperoleh pada waktu yang berbeda dan dengan biaya akuisisi yang berbeda, maka tidak diperbolehkan untuk menjumlahkan saham-saham individual dan membentuk harga akuisisi rata-rata. Akibatnya, keuntungan atau kerugian dari penjualan saham dalam suatu perusahaan harus ditentukan secara pro rata.

Sehubungan dengan pendapatan dari Bagian 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Jerman (EStG), Pengadilan Fiskal Federal menyatakan bahwa, pada prinsipnya, wajib pajak bebas untuk memutuskan apakah, kapan, dan kepada siapa ia menjual sahamnya. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku jika pelepasan tersebut mengakibatkan kerugian. Pertimbangan kerugian atas pelepasan saham tidak hanya sejalan dengan Pasal 17 EStG, tetapi juga sesuai dengan prinsip perpajakan berdasarkan kemampuan membayar dan dengan demikian tidak menyalahi hukum sejak awal.

Premi yang dibayarkan untuk suatu saham tertentu akan meningkatkan biaya akuisisi saham tersebut, meskipun jumlah nilai nominal dan premi tersebut melebihi nilai pasar saham tersebut (yang disebut sebagai kelebihan nilai nominal). Hal ini berlaku untuk pelepasan hingga 31 Juli 2019.

Catatan

Namun, perlu dicatat bahwa dalam kasus ini pelepasan terjadi sebelum 31 Juli 2019. Untuk pelepasan selanjutnya, perubahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan harus diperhatikan, yang menyatakan bahwa premi dari penerbitan yang melebihi par harus didistribusikan secara merata di antara semua saham yang dipegang oleh wajib pajak.

Pengurangan pajak untuk penggunaan jasa pengrajin sesuai dengan Pasal 35a (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Jerman (EStG)

Selain menjalankan rumah tangga (yang sebenarnya), mengklaim pengurangan pajak untuk jasa pengrajin sesuai dengan Pasal 35a (3) EStG tidak memerlukan hak penggunaan khusus dari pihak wajib pajak.

Dengan demikian, wajib pajak juga dapat menjalankan rumah tangga di tempat yang disediakan secara gratis. Hal ini tidak berbahaya jika wajib pajak telah mengikatkan diri pada pihak ketiga untuk menanggung biaya jasa pengrajin.

Pandangan awal dari pengadilan yang lebih rendah bahwa pengurangan pajak mensyaratkan bahwa jasa diberikan untuk kepentingan aset yang dimiliki - setidaknya secara ekonomi - oleh wajib pajak atau di mana wajib pajak memiliki hak wajib untuk menggunakannya, dibantah oleh putusan Pengadilan Fiskal Federal. Pengurangan pajak untuk jasa pengrajin tidak memerlukan hak penggunaan khusus oleh wajib pajak selain untuk menjalankan rumah tangga. Oleh karena itu, wajib pajak juga dapat menjalankan rumah tangga di tempat yang disediakan secara gratis.



Jika syarat-syarat untuk pengurangan pajak untuk jasa pengrajin terpenuhi, hal ini juga dapat diklaim jika wajib pajak telah menyanggupi pihak ketiga untuk menanggung biaya jasa pengrajin. Hal ini juga tidak relevan jika hal ini dilakukan secara sukarela, yaitu tanpa kewajiban hukum, seperti dalam kasus yang dipermasalahkan.

Pengadilan Fiskal Federal menganggap tidak relevan bahwa jasa pengrajin juga harus diakui jika wajib pajak membayar untuk tindakan itu sendiri, meskipun hal ini menguntungkan seluruh rumah (dalam kasus perselisihan: renovasi atap). Jika wajib pajak menerima penggantian biaya - dari siapa pun - hal ini akan mengurangi pengurangan pajak. Menurut Pengadilan Fiskal Federal, setiap klaim kompensasi yang dapat dibayangkan secara teoritis tidak dapat dikompensasikan dengan pembayaran yang telah dilakukan hingga klaim tersebut dipenuhi.

Untuk orang yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan

Kompensasi untuk pemecatan: Aliran masuk upah dalam hal saldo kredit - kewajiban untuk pajak upah

Pengadilan Fiskal Federal mengomentari apakah pembayaran pesangon yang dilakukan sebagai kompensasi atas hilangnya pendapatan dari pekerjaan non-independen dapat secara efektif ditambahkan ke akun nilai waktu (Wertguthaben) atau ditransfer ke Asuransi

Pensiun Jerman (DRV) Bund tanpa pajak untuk menghindari arus masuk ke karyawan. Karyawan tidak berhak atas upah (pembayaran redundansi) bahkan jika perjanjian tentang alokasi ke saldo kredit karyawan atau transfer saldo kredit ke DRV Bund sesuai dengan perjanjian tersebut seharusnya tidak sah menurut hukum asuransi sosial, sejauh semua pihak yang terlibat tetap mengizinkan hasil ekonomi terjadi dan ada.

Dalam kasus yang disengketakan, dapat dikesampingkan bahwa pembayaran pesangon, sejauh yang akan dialokasikan ke akun jangka panjang yang bersangkutan, telah menjadi hak karyawan dalam periode yang disengketakan. Oleh karena itu, pajak upah tidak timbul dan kewajiban (tambahan) penggugat tidak dapat dipertimbangkan. Hasil ini dikonfirmasi oleh fakta bahwa DRV Bund harus memotong dan membayar pajak upah untuk setiap pembayaran sebagian dari saldo kredit.

Pajak penghasilan badan

Tidak ada VGA dalam hal penebusan dini atas komitmen pensiun yang direasuransikan kepada direktur utama pemegang saham pengendali

Pengadilan Fiskal Münster mengomentari apakah penebusan awal komitmen pensiun yang direasuransikan kepada direktur utama pemegang saham pengendali, yang disetujui karena krisis GmbH, mengarah pada distribusi keuntungan tersembunyi (vGA).

Dari perspektif hukum pajak, tidak ada keberatan jika komitmen pensiun tidak dibuat tergantung pada pengunduran diri penerima manfaat dari hubungan kerja sebagai direktur utama pada saat terjadinya peristiwa pensiun. Namun, dalam kasus seperti itu, direktur utama yang bijaksana dan teliti akan, untuk menghindari VGA, meminta agar pendapatan dari pekerjaan yang berkelanjutan sebagai direktur utama dikompensasikan dengan manfaat pensiun atau akan menunda dimulainya pembayaran pensiun yang telah disepakati hingga penerima manfaat akhirnya mengakhiri posisinya sebagai direktur utama. Tujuan sebenarnya dari pensiun perusahaan untuk masa kerja yang berkelanjutan akan terlewatkan jika pensiun saat ini dibayarkan dan pada saat yang sama hubungan kerja dilanjutkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya dengan imbalan gaji saat ini.

Menurut standar ini, pengadilan yakin bahwa pembayaran yang dilakukan oleh GmbH kepada penggugat untuk menyelesaikan komitmen pensiun untuk kepentingan penggugat bukan untuk perusahaan,

tetapi untuk alasan bisnis dan oleh karena itu tidak ada vGA.

Untuk pembayar PPN

"Perlu diketahui" tentang penipuan PPN pihak ketiga

Menurut keputusan Pengadilan Fiskal Federal, langkah-langkah yang mungkin diperlukan oleh wajib pajak untuk mencegah keterlibatannya sendiri dalam penipuan PPN pihak ketiga pada dasarnya bergantung pada keadaan dalam setiap kasus, yang harus ditentukan sesuai dengan aturan pembuktian menurut hukum nasional, yang tidak boleh mengganggu efektivitas hukum Uni.

Pengusaha Kena Pajak pada umumnya tidak diwajibkan untuk memeriksa apakah penerbit faktur untuk pasokan barang yang hak untuk memotong PPN diklaim memiliki barang yang bersangkutan, mampu memasoknya dan memenuhi kewajibannya terkait pernyataan dan pembayaran PPN. Namun, jika ada indikasi penyimpangan atau penipuan PPN, orang yang dikenakan pajak mungkin berkewajiban untuk mendapatkan informasi tentang pedagang lain yang darinya ia bermaksud untuk membeli barang atau jasa untuk memuaskan dirinya sendiri tentang keandalan pedagang tersebut.

Catatan

Agar pembeli dapat memotong pajak masukan, tidak ada persyaratan umum bahwa PPN yang timbul telah benar-benar dibayar oleh subkontraktor.

Namun, hak pembeli untuk memotong pajak masukan dapat ditolak jika pembeli mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pemasok atau pihak lain terlibat pada tahap transaksi sebelumnya atau selanjutnya dalam tindakan penghindaran PPN atau dalam memperoleh pengurangan pajak masukan yang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 370 Kode Fiskal Jerman (AO) atau dalam merusak pendapatan PPN sesuai dengan Bagian 26b dan 26c Undang-Undang Pajak Perputaran (Bagian 25f Undang-Undang Pajak Perputaran).

Perundang-undangan

Permintaan untuk mengurangi pajak penjualan secara permanen di industri catering

Penurunan tarif pajak penjualan permanen sebesar tujuh persen untuk konsumsi makanan di restoran gagal meraih suara mayoritas di Bundestag pada 21 September 2023.

Mecklenburg-Western Pomerania dan Sachsen-Anhalt menyerukan agar penurunan tarif PPN sebesar tujuh persen dipertahankan di sektor catering secara permanen. Pada 29.09.2023, inisiatif yang sesuai dipresentasikan di Bundesrat dan dirujuk ke komite spesialis. Pada tanggal 9 Oktober 2023, komite spesialis Bundesrat - Komite Keuangan sebagai komite utama, Komite Ekonomi sebagai komite penasihat bersama dan Komite Tenaga Kerja, Integrasi dan Kebijakan Sosial - menyerukan dimasukkannya penangguhan penurunan tarif PPN di sektor catering setelah 31 Desember 2023 dalam Undang-Undang Peluang Pertumbuhan sebagai bagian dari pendapat mereka tentang Undang-Undang Peluang Pertumbuhan.

Dewan Federal akan memutuskan pada tanggal 20.10.2023 rekomendasi mana yang akan dibuat.

Kabinet Federal memutuskan asuransi sosial ukuran perhitungan 2024

Pada tanggal 11 Oktober 2023, Kabinet Federal menyetujui Ordonansi tentang Parameter Perhitungan Jaminan Sosial 2024. Bundesrat masih harus menyetujuinya sebelum diundangkan dalam Lembaran Negara.

Nilai referensi sangat penting untuk banyak nilai dalam asuransi sosial - antara lain untuk menentukan **dasar penilaian kontribusi minimum untuk** anggota sukarela dalam asuransi kesehatan wajib atau untuk menghitung kontribusi bagi para pekerja mandiri yang tunduk pada asuransi wajib dalam asuransi pensiun wajib. Pada tahun 2024, angka referensi akan naik menjadi **3.535 euro/bulan** (2023: 3.395 euro/bulan); **angka referensi (Timur)** menjadi **3.465 euro/bulan** (2023: 3.290 euro/bulan).

Plafon penilaian kontribusi dalam skema asuransi pensiun umum akan meningkat menjadi **7.550 euro/bulan** (2023: 7.300 euro/bulan) dan plafon **penilaian kontribusi (Timur)** menjadi **7.450 euro/bulan** (2023: 7.100 euro/bulan).

Batas asuransi wajib yang seragam secara nasional untuk asuransi kesehatan wajib (**batas penghasilan**

tahunan) adalah **69.300 euro pada tahun 2024** (2023: 66.600 euro). Batas **pendapatan untuk asuransi kesehatan wajib, yang** juga seragam di seluruh Jerman, akan naik menjadi **62.100 euro per tahun** (2023: 59.850 euro) atau 5.175 euro per bulan (2023: 4.987,50 euro).

Undang-undang efisiensi energi disahkan

Dengan Undang-Undang Efisiensi Energi (EnEfG) yang disahkan oleh Bundestag Jerman pada tanggal 21 September 2023, **perusahaan** dengan konsumsi energi yang besar (rata-rata lebih dari 7,5 GWh) juga akan diwajibkan untuk memperkenalkan sistem manajemen energi atau lingkungan, dan perusahaan dengan total konsumsi energi akhir 2,5 GWh atau lebih harus mencatat dan mempublikasikan langkah-langkah efisiensi energi ekonomis dalam rencana implementasi. Namun, perusahaan-perusahaan itu sendiri yang memutuskan penerapan langkah-langkah efisiensi yang sesuai.

Standar efisiensi energi berlaku untuk **pusat data**. Limbah panas juga harus digunakan di masa depan, karena di sinilah potensi efisiensi energi yang lebih besar terbengkalai. Selain itu, semua operator pusat data besar harus menggunakan listrik dari energi terbarukan di masa depan, serta memasukkan informasi tentang konsumsi energi mereka ke dalam daftar publik dan memberi tahu pelanggan mereka tentang konsumsi energi spesifik mereka.

Undang-undang tersebut tidak perlu disetujui. Bundesrat menyetujui undang-undang tersebut pada tanggal 20 Oktober 2023. Sekarang undang-undang tersebut akan diteruskan kepada Presiden Federal untuk ditandatangani melalui Pemerintah Federal.

Undang-undang energi bangunan disetujui

Undang-undang yang disebut Undang-Undang Pemanasan, yang disahkan Bundestag pada tanggal 8 September 2023, berhasil melewati rintangan parlemen terakhir di Bundesrat pada tanggal 29 September 2023. Hal ini secara otomatis menyetujui undang-undang tersebut, yang tidak memerlukan persetujuan negara bagian. Undang-undang tersebut sekarang akan diteruskan melalui pemerintah federal kepada Presiden Federal untuk ditandatangani dan kemudian dapat diundangkan dalam Lembaran Negara Federal. Undang-undang ini diharapkan mulai berlaku di sebagian besar wilayah pada tanggal 01.01.2024.

Revisi saat ini juga selaras dengan Undang-Undang Energi Bangunan (GEG) dengan undang-undang baru

tentang "Perencanaan Panas dan Dekarbonisasi Jaringan Panas" (WPG). Versi baru GEG menetapkan bahwa mulai tahun 2024, semua sistem pemanas yang baru dipasang harus didukung oleh setidaknya 65 persen energi terbarukan.

Hukum ketenagakerjaan

Sertifikat tidak boleh rusak karena permintaan perubahan

Jika pemberi kerja memperburuk referensi karena karyawan telah meminta perubahan pada referensi tersebut, maka hal ini melanggar larangan tindakan disipliner. Menurut Pengadilan Perburuhan Federal, pemberi kerja tidak boleh memperburuk referensi versi ketiga dan menghilangkan formula ucapan terima kasih yang sebelumnya disertakan di dalamnya hanya karena karyawan telah meminta perubahan pada referensi tersebut dua kali sebelumnya. Memang benar bahwa pada prinsipnya tidak ada hak untuk mencantumkan formula ucapan terima kasih di bagian akhir. Namun, menghapusnya karena pelaksanaan hak hukum yang diizinkan akan melanggar larangan peraturan berdasarkan Pasal 612a KUH Perdata Jerman (BGB), yang terus berlaku bahkan setelah pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, terdapat klaim atas formula ucapan terima kasih.

Lainnya

Kewajiban bagi (hampir) semua perusahaan untuk masuk dalam daftar transparansi

Hampir semua perusahaan diwajibkan untuk mendaftar dan melapor ke daftar transparansi per tanggal 01.08.2021. Jika entri belum dibuat, mereka harus dibuat sebagai hal yang mendesak. Jika tidak, denda dapat dikenakan. Kementerian Keuangan Federal sekali lagi menarik perhatian pada hal ini dalam sebuah surat kepada asosiasi.

Semua badan hukum di bawah hukum privat (misalnya AG, GmbH dan Unternehmergeellschaft (haftungsbeschränkt)) dan kemitraan yang terdaftar (misalnya OHG, KG, PartG) serta yayasan tanpa kapasitas hukum, perwalian, dan asosiasi yang sebanding akan terpengaruh.

Kepemilikan perseorangan, pedagang terdaftar (e. K.) dan kemitraan hukum perdata (GbR) saat ini tidak terpengaruh, meskipun yang terakhir ini akan menjadi tunduk pada pendaftaran sebagian karena reformasi

hukum tentang kemitraan (MoPeG) mulai 01.01.2024. Dengan adanya MoPeG, GbR akan dapat mendaftar dalam daftar perusahaan baru yang akan dibuat. Akibatnya, GbR dalam bentuk yang disebut "eGbR" akan menjadi salah satu kemitraan yang terdaftar dan dengan demikian juga harus dimasukkan dalam daftar transparansi.

Masa transisi sekarang telah berakhir, yaitu semua

pihak yang terkena dampak harus mengambil tindakan, terlepas dari apakah informasi tersebut telah tersedia di daftar publik lainnya (misalnya daftar komersial, koperasi, kemitraan) .

Tanggal Pajak/Jaminan Sosial

November/Desember 2023

Jenis kontrol		Kedewasaan	
Pajak upah, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		10.11.2023 ¹	11.12.2023 ¹
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		Tidak berlaku	11.12.2023
Pajak penghasilan perusahaan, biaya tambahan solidaritas		Tidak berlaku	11.12.2023
Pajak penjualan		10.11.2023 ²	11.12.2023
Akhir masa tenggang jenis pajak di atas ketika dibayar oleh:	Transfer bank ⁴	13.11.2023	14.12.2023
	Periksa ⁵	10.11.2023	11.12.2023
Pajak perdagangan		15.11.2023	tidak berlaku
Pajak properti		15.11.2023	tidak berlaku
Akhir masa tenggang jenis pajak di atas ketika dibayar oleh:	Transfer bank ⁴	20.11.2023	tidak berlaku
	Periksa ⁵	15.11.2023	tidak berlaku
Jaminan sosial ⁶		28.11.2023	27.12.2023
Pajak keuntungan modal, biaya tambahan solidaritas		Pajak capital gain dan biaya tambahan solidaritas harus dibayarkan ke kantor pajak yang bertanggung jawab pada saat yang sama ketika distribusi keuntungan dilakukan kepada pemegang saham.	

- Selama sebulan terakhir.
- Untuk bulan terakhir, untuk bulan kedua dari belakang dalam hal perpanjangan permanen, untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan dengan perpanjangan permanen.
- Selama satu bulan terakhir, dalam kasus perpanjangan permanen untuk bulan kedua dari belakang.
- Biasanya, pengembalian PPN di muka dan pengembalian pajak upah harus diserahkan (secara elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka hari kerja berikutnya adalah tenggat waktunya. Tidak ada biaya keterlambatan yang akan dikenakan jika pembayaran terlambat hingga tiga hari. Pengiriman uang harus dilakukan lebih awal sehingga tanggal nilai pada rekening kantor pajak sama dengan tanggal jatuh tempo.
- Jika pembayaran dilakukan dengan cek, perlu dicatat bahwa pembayaran tidak dianggap telah dilakukan sampai tiga hari setelah cek diterima oleh kantor pajak. Otorisasi pendebitan langsung harus diterbitkan sebagai gantinya.
- Juran jaminan sosial secara seragam jatuh tempo pada hari kerja bank ketiga terakhir di bulan berjalan. Untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran, disarankan untuk menggunakan prosedur debit langsung. Semua dana asuransi kesehatan memiliki tenggat waktu yang seragam untuk penyerahan laporan kontribusi. Laporan tersebut harus diterima oleh agen penagihan masing-masing selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (yaitu pada tanggal 24.11.2023/21.12.2023, pukul 0:00 dalam setiap kasus). Keunikan regional terkait tanggal jatuh tempo mungkin harus dipertimbangkan. Jika akuntansi penggajian dilakukan oleh agen eksternal, data penggajian harus dikirim ke agen sekitar sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini berlaku khususnya jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Senin atau pada hari setelah hari libur nasional.

Jejak

Konten telah dipersiapkan dengan sangat hati-hati, tidak mengklaim sebagai sesuatu yang lengkap dan tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan saran dalam kasus-kasus individual. Artikel dan ilustrasi **yang** terdapat di dalamnya dilindungi oleh hak cipta.